

"Pil Pahit" Jokowi

Selasa , 27 November 2018 | 09:06

http://www.sinarharapan.co/opinieditorial/read/4916/_pil_pahit_jokowi



Sumber Foto Jokowinomics Ilustrasi

Ibarat orang sakit, bangsa Indonesia membutuhkan pil pahit yang akan menyembuhkan dan membuat tubuh lebih segar dan kuat. Tapi bagaimana kalau sudah meminum pil pahit kondisi perekonomian masih saja berat? Tentu dibutuhkan refleksi dan pemikiran lebih mendalam, apa yang perlu dikoreksi dan diperbaiki ke depan.

Presiden Joko Widodo menyebut proses perbaikan perekonomian sebagai pil pahit, yang harus diminum agar bisa menjadi bangsa yang sehat, produktif, kompetitif dan efisien. "Memang kadang-kadang apa yang kita hasilkan tidak instan, tidak bisa langsung kita nikmati. Itulah pil, kadang-kadang pahit, sakit, tapi harus minum," kata Jokowi saat bicara dalam acara ulang tahun MetroTV yang ke-18 di Jakarta, Senin malam.

Jokowi menggambarkan kondisi awal masa pemerintahannya empat tahun lalu ketika perekonomian tertekan karena harga-harga komoditas anjlok, seperti batubara, sawit, karet, karena memang ekonomi dunia yang juga dalam posisi menurun. "Masa *booming* minerba sudah selesai. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi ekonomi Indonesia untuk harus berubah," katanya.

Maka, kata Presiden, pemerintahannya harus memperbaiki pondasi-pondasi ekonomi yang dalam keadaan menurun tersebut. "Kita bekerja keras membangun pondasi-pondasi baru. Kita semua ingin bangsa ini hijrah. Hijrah dari yang konsumtif ke yang produktif, kita ingin hijrah menuju bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif," katanya.

Tanpa kerja keras tersebut, katanya, Indonesia akan sangat berat untuk bersaing dengan negara-negara lain. Namun apa yang dihasilkan tidak instan atau tidak bisa langsung dinikmati. Untuk bisa jadi bangsa yang sehat produktif, kompetitif dan efisien, pemerintah juga telah memperbaiki struktur fiskal. Beberapa kebijakan yang disebutkan sebagai pil pahit tersebut antara lain:

Pertama, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM ketika itu sekitar 82 persen justru dinikmati kalangan masyarakat atas.

Kedua, pembangunan tidak lagi "Jawa Sentris", tapi "Indonesia Sentris". "Kita memilih yang 'Indonesia Sentris' karena kita ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar Jawa," tegasnya.

Ketiga, pemangkasan berbagai regulasi yang berbelit-belit dan menghambat investasi. Diberikan contoh, proses perijinan membangun pembangkit tenaga listrik sangat panjang, ada 258 izin yang harus ditempuh. Kini tinggal 58. "Saya bilang belum cukup, terlalu banyak izin seperti itu. Tapi ini perlu proses tidak bisa instan, perlu proses untuk mulai kompetitif, efisien,"

Kita sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa bangsa Indonesia harus meninggalkan kebiasaan buruk yang terlalu konsumtif dan berubah menjadi lebih produktif. Peningkatan produktifitas tersebut harus dimulai dari kebiasaan masyarakat, pola pendidikan yang tepat, sikap disiplin serta menghargai karya dan prestasi.

Beberapa hal telah bisa kita saksikan sebagai hasil yang dicapai selama empat tahun pemerintahan Jokowi. Namun tentu saja orang bisa mengkritisi capaian-capaian tersebut karena dalam sejumlah aspek lain kita belum melihat kinerja yang bagus. Beberapa contoh yang sering dikemukakan para pengamat antara lain kinerja ekspor yang menurun, kurs rupiah yang terus melemah, penurunan daya beli masyarakat dan beberapa hal lainnya.

Kita memang bergerak maju, namun negara-negara lain di sekitar kita bergerak lebih cepat dari apa yang kita lakukan. Hal itu terlihat dari beberapa indikator, misalnya, tingkat daya saing kita masih di bawah negara lain di Asean. Indonesia adalah negara besar yang pada masa lalu menjadi poros penting dalam diplomasi antarbangsa, terlebih lagi di Asean dan negara-negara berkembang, namun posisi itu kini tidak lagi kita miliki.

Tanpa bermaksud membandingkan dengan visi politik rival Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti, menarik juga pandangan Prabowo Subianto ketika bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong, Senin (26/11). Prabowo yang akan berbicara pada acara The Economist

World in 2019 Gala Dinner di Singapura, mengatakan Indonesia semestinya bisa menjadi negara pengekspor energi, pangan, air. "Bukan importir," ujarnya.

Kita, tentu saja, tidak akan mudah mencapainya. Tentu akan lebih banyak "pil pahit" yang harus diminum sehingga sebagai bangsa kita makin kuat. Kita tidak hanya harus kuat secara ekonomi, namun sebagai bangsa kita harus menjaga kehormatan dan integritasnya. Kita harus makin terpadu, bukan tercerai berai, saling curiga dan "saling tabok" satu sama lain. Pil pahit itu bukan hanya memperkuat daya tahan tubuh, namun mampu mendinamisasi kemajuan sehingga disegani bangsa-bangsa lain.

Sumber Berita:Berbagai sumber